

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Siti Dewi Soleha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru
E-mail : dewisoleha48@gmail.com

diterima: 16/5/2023; direvisi: 12/8/2024; diterbitkan: 30/11/2024

Abstract: *Research conducted by the author at the education and culture office of the Siak Regency which is located on Jalan Panglima Undan No. 02 kel Kp. Rempaksiak Sri Indrapura, the Siak Regency Education and Culture Office is a government office engaged in public services engaged in education, is the construction of facilities and infrastructure in charge of carrying out regional government affairs based on the principle of autonomy and assistance tasks in the field of education and culture. The research method used is descriptive analysis method, namely data and information obtained from research, then analyzed and compared with existing theories with reality which is then concluded. This study aims to determine whether the accounting treatment of the Siak Regency Education and Culture Office is in accordance with Government Accounting Standards No. 71 of 2010. Based on the results of this study at the education and culture office of Siak Regency, it shows that fixed assets, recognition, valuation, measurement, and disclosure of assets have not shown a reasonable book value and still some assets show that they are not in accordance with government accounting standards.*

Keywords: *fixed assets, recognition, valuation, measurement, disclosure*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi perkembangan perekonomian teknologi yang semakin canggih dapat mempengaruhi setiap aktivitas pemerintah, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Masalah yang dihadapi pemerintah juga semakin rumit dan sulit terutama saat penyajian laporan keuangan. Untuk dapat mencapai tujuan *good governance* pemerintahan selalu menghadapi masalah baik dari luar maupun dari dalam pemerintah, oleh karena itu perlu dilakukan adanya pengendalian intern yang dapat mengatasi atau membantu memperlancar kegiatan organisasi dan memperkecil terjadinya resiko dalam kesalahan atau penyimpangan di setiap aktivitas yang dilakukan pemerintah. Setiap pemerintahan daerah memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik yang bersifat

jangka panjang ataupun jangka pendek. menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak akan dapat mencapai tujuan tersebut tanpa adanya aset yang dapat membantu kelancaran operasional rutin kegiatan pemerintah, terutama aset tetap (*fixed asset*). Aset tetap adalah aset yang dimiliki pemerintah memiliki peran sangat penting, dengan adanya aset tetap pemerintah dapat menjalankan aktivitas kegiatan operasional rutinnya dengan baik. Aset tetap yaitu suatu unsur yang harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan suatu informasi yang handal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap merupakan modal awal bagi pemerintah daerah yang dapat melakukan pengembangan dalam kemampuan keuangannya serta menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambahan dalam mengelola aset hal ini sebagai bentuk pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam peraturan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 71 tahun 2010 (2011;402) adalah :

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainya misalnya, instansi pemerintah lainya, universiitas, dan kontraktor.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak adalah pemerintah yang adadi kabupaten siak yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan. Di pimpin seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan serta penilaian atas pelaksanaannya. Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak memerlukan aset tetap didalam menjalankan aktivitasnya. Aset yang digunakan sebagai memperlancar dalam suatu kegiatan yang ada pada dinas dan mempermudah dalam suatu pekerjaan. Aset tetap yang dimiliki Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak diperoleh dengancara pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap dan pengeluaran yang bersifat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ke ekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Dimana dalam penanganan dan perilaku akuntansi pemerintahan pada dinas pendidikan serta kebudayaan kabupaten siak mempunyai perlakuan yang sama terhadap transaksi tersebut untuk kategori yang pertama perlakuan akuntansi, adalah dengan membebaskan semua pengeluaran yang

terjadi sebagai belanja pemeliharaan. alasannya adalah pengeluaran tersebut hanya bersifat agar aset tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam proses operasional entitas. Adapun aset tetap yang dimiliki Dinas pendidikan dan kebudayaan Per tanggal 31 Desember 2017 digambarkan sebagai berikut :

**Daftar Aset Tetap
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Siak
Periode 31 Desember 2017**

1. Tanah	Rp. 7.694.733.000
2. Peralatan dan mesin	Rp. 8.680.772.440 Rp. 7.850.601.124
3. Gedung dan bangunan	Rp. 157.133.480 Rp 24.273.990.291
4. Aset tetap lainnya	(Rp. 7.763.619.982)
Jumlah Akumulasi penyusutan	Rp. 16.619.620.062
Jumlah	

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak*

**Daftar Biaya Perolehan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Siak
Periode 31 Desember 2017**

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Perolehan Satuan	Harga Perolehan Keseluruhan	Tahun Perolehan	Biaya Pemasaan	Jumlah Biaya Pemasaan
1	CCCT	4	2.030.	8.120.	201	500.	2.000.0
.	V	5	000	000	2	000	00
2	AC Stan ding		20.84 0.000	104.20 0.000	201 7	700. 000	3.500.0 00

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak*

Ada beberapa perlakuan aset tetap pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak yang masih belum sesuai dengan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 :

1. Dinas membeli Unit/CCTV yang dibeli pada tanggal 14 juni 2012 dinas tercatat faktur belanja pembelian sebesar Rp. 2.030.000,- tanpa menambahkan biaya pemasangan peralatan sebesar Rp. 500.000,- di dalam perolehan dan dibebankan kedalam periode berjalan tersebut kedalam beban service atau pemeliharaan rutin, (Lampiran 1 DPA- SKPD 2012).
2. Dinas membeli Unit/ AC Standing polytron yang dibeli tanggal 12 mei 2017, dinas tercatat faktur belanja sebesar Rp. 20.840.000,- tanpa menambahkan biaya pemasangan sebesar Rp. 700.000,- di dalam perolehan dan dibebankan kedalam periode berjalan tersebut kedalam beban service atau pemeliharaan rutin (Lampiran 2 DPA-SKPD 2017).
3. Aset yang sudah habis masa periodenya tetapi masih digunakan dalam operasi kegiatan dinas dan dinas masih melakukan pengeluaran biaya pemeliharaan atas aset tetap tersebut. Salah satunya, kendaraan Toyota (BM 233 S) sebesar Rp. 80.000.000,- diperoleh pada tanggal 15 mei 2007, disusut selama 7 tahun. Dan pada tahun 2013 sudah habis masa manfaat aset tersebut bernilai buku 0. Akan tetapi pada tahun 2014 dinas masih dilakukan pengeluaran biaya pemeliharaan kendaraan tersebut. Tanpa menambah masa aset tersebut , total biaya pemeliharaan dan perbaikan mobil tersebut pada tahun

2014 adalah 5.000.000,-. (Lampiran 3 DPA-SKPD 2014).

4. memiliki mobil yang diperoleh bulan oktober 2013 sebesar Rp. 206.590.000,- baru dalam pemakaian, namun penyusutan pada tahun perolehannya dihitung 1satu tahun penuh. Dampak yang terjadi, pembebanan penyusutan pada periode tersebut teralulunggi, akibatnya biaya perolehan yang dihasilkan pada periode tersebut menjadi terlalu rendah , hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 “penyusutan dihitung 1 (satu) tahun meskipun baru di peroleh 1 (satu), atau 2 (dua) bulan atau bahkan 2 (hari), diadakan pada april 2015 maka penyusutannya dihitung pada tahun 2015”. Dalam peraturan standar akuntansi pemerintah PSAP No.71 tahun 2010 “ penyusutan asset dimulai pada saat asset tetap tersebut siap dipergunakan yaitu aset berada dilokasi dan kondisi yang siap gunakan sesuai dengan intansi pemerintahan, kecuali untuk aset yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut”.
5. Penghentian dan penghapusan aset tetap. didalam daftar laporan keuangan aset tetap terdapat beberapa masalah yang ditemukan yaitu padatahun 2002-2016, sebesar Rp. 11.105.681.570,- terdapat aset dalam kondisi B (baik), yang masa manfaatnya sudah habis 0 (nol) namun masih dicantumkan kedalam daftar aset tetap tanpa dinilai kembali. tahun 2001-2012, sebesar Rp. 787.866.200,- tercatat aset dalam kondisi KB (kurang baik) atau rusak, yang masa manfaatnya sudah habis 0

(nol) dan terdapat satu aset Supra X (BM 3905 S) tahun 2012 sebesar Rp. 15.578.800,- masih ada tersisa masa umur 1 tahun dalam keadaan rusak namun masih tersajikan dalam laporan daftar aset tetap. kemudian Tahun 2001-2012 tercatat sebesar Rp. 2.231.415.400,- aset mengalami RB (rusak berat) yang masa manfaatnya sudah habis 0 (nol) dihentikan pemakaiannya akan tetapi tidak dilakukan pelepasan dan penghapusan di dalam neraca laporan keuangan aset tetap, sehingga hal tersebut tercatat sebagai kerugian. Menurut Peraturan PSAP No 71 Tahun 2010 dinyatakan sebagai suatu aset tetap yang dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. (Lampiran 5 Daftar Aset Tetap)

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneltiann lebih lanjut dngan judul Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sertadapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset yang nilainya paling besar dalam neraca suatu entitas, sehingga penyajian dan pengungkapan informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. (deddi nordiawan, dkk; 2012; 229).

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (fokusmedia; 2011; 169).

b. Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap merupakan membantu pengguna informasi dalam laporan keuangan atas nilai aset tetap sebenarnya, yaitu antara aset yang disusutkan dengan yang tidak bisa disusutkan. Suatu pemerintahan dapat mempunyai berbagai macam bentuk aset diantaranya seperti tanah, gedung, peralatan mesin serta aset tetaplainya sebagainya.

Abdul Hafis tanjung (2018; 185) dalam PSAP BA 07 paragraf 7 dinyatakan bahwa aset tetap diklafisikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

c. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur denganhandal. Pengakuan aset tetapsangat andal apabila asettetap tersebut telahditerima atau diserahkan kepada hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpisah.

Dwi ratmono dan mahfud sholihin (2015; 158) dalam buku nyamenyatakan aset tetap menurut PSAP 07 paragraf 4 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

d. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP, aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan

e. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, bila aset diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat perjalanan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah sebagai contoh dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintah. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

F. Penghentian dan pelepasan aset tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang, aset yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainya sesuai dengan nilai tercatatnya, aset tetap gedung jika ada pelepasan dicatat berdasarkan nilai buku dan ditambah penyusutan (jika diketahui nilai penyusutannya). Nilai pelepasan aset tetap menggunakan sistem lelang, nilai pelepasan dicatat sebesar nilai wajar, tukar guling (*ruislag*) aset dicatat sebesar nilai wajar, masa waktu dapat dilakukan pelepasan aset tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat audio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala selama 5 tahun dari sejak diperoleh, peralatan yang rusak atau hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara.

METODE PENELITIAN

Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak yaitu Analisis yang digunakan dengan permasalahan yang ditemukan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan membandingkan kenyataan yang ada dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan selanjutnya membuat kesimpulan dan saran yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penentuan harga perolehan

Harga Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Berdasarkan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak terdapat permasalahan sebagai berikut Dinas membeli Unit/CCTV yang dibeli pada tanggal 14 juni 2012 dinas tercatat faktur brlanja membeli sebesar Rp. 2.030.000,- tanpa menambahkan biaya pemasangan peralatan sebesar Rp. 500.000,- ke dalam perolehan dan dibebankan ke dalam periode berjalan tersebut ke dalam beban service atau pemeliharaan rutin, (Lampiran 1 DPA- SKPD 2012).

Pencatatan yang dilakukan dinas sebagai berikut :

Biaya pemasangan Rp. 500.000,-

Kas Rp. 500.000,-

Dengan tidak dicantumkan biaya pemasangan tersebut dalam harga perolehan aset tetap, maka akan menyebabkan nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca mengakibatkan kurangnya perolehan dalam periode berjalan tersebut. Seharusnya dinas memasukkan biaya pemasangan peralatan ke dalam harga perolehan tersebut :

Peralatan Unit/CCTV Rp. 500.000,-

Kas Rp. 500.000,-

Setelah biaya pemasangan peralatan dimasukkan ke dalam harga perolehan maka harga perolehan aset tetap tersebut menjadi Rp. 2.530.000,-

Jurnal koreksi jika kesalahan ditemukan ke dalam buku yang bersangkutan 2012 adalah :

Peralatan Unit/CCTV Rp. 500.000,-

Biaya Pemasangan Rp. 500.000,-

Setelah biaya pemasangan dimasukkan ke dalam harga perolehan aset tetap yang disajikan dalam neraca akan bertambah besar dan harga perolehan menjadi lebih besar.

Bertambahnya harga perolehan aset tetap akan berpengaruh pada perhitungan penyusutan.

Perhitungan ulang penyusutan aset tetap tersebut untuk tahun 2012 yaitu :

$Rp. 2.530.000 \times 10\% \times 5/12$ (lima bulan pakai) = Rp. 105.417,-

Jurnal yang harus dibuat dinas yaitu :

Beban penyusutan peralatan Rp. 105.417,-

Akumulasi penyusutan peralatan Rp. 105.417,-

Jurnal yang harus dibuat dinas yaitu :

$Rp. 2.530.000 \times 10\% \times 5/12$ (beban setelah koreksi) = Rp. 105.417,-

$Rp. 2.030.000 \times 10\% \times 5/12$ (beban sebelum koreksi) = Rp. 84.583,-

Jurnal koreksi kesalahan yang dibuat dinas untuk tahun berjalan :

Akumulasi penyusutan peralatan Rp. 20.833,-

Beban penyusutan peralatan Rp. 20.833,-

Jika kesalahan ini dikoreksi setelah tutup buku maka jurnal pembetulan yang harus dibuat dinas yaitu :

Akumulasi penyusutan peralatan Rp. 20.833,-

Perolehan ditahan Rp. 20.833,-

Apabila dinas tidak memasukkan semua biaya yang dikeluarkan ke dalam biaya perolehan yang siap untuk digunakan, maka jumlah aset tetap yang diperoleh dinas dalam laporan keuangan lebih kecil (*under value*) dari yang seharusnya. Hal ini mengakibatkan besarnya nilai akumulasi penyusutan yang diperoleh dalam neraca lebih kecil atau bukan nilai yang seharusnya untuk setiap aset tetap.

Permasalahan kedua dalam penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak terdapat permasalahan sebagai berikut Dinas membeli Unit/ AC Standing polytron yang dibeli tanggal 12

mei 2017, dinas mencatat faktur pembelian sebesar Rp. 20.840.000,- tanpa menambah kan biaya pemasangan sebesar Rp. 700.000,- kedalam perolehan dan dibeban kan kedalam periode berjalan tersebut kedalam beban service atau pemeliharaan rutin (Lampiran 2 DPA-SKPD 2017).

Pencaatatan yang dilakukan dinas sebagai berikut :

Biaya pemasangan Rp. 700.000,-

Kas Rp. 700.000,-

Dengan tidak dicantumkan biaya pemasangan tersebut dalam harga perolehan asset tetap, maka akan menyebabkan nilai asset tetap yang disajikan dalam neraca mengakibatkan kurangnya perolehan dalam periode berjalan tersebut.

Seharusnya dinas memasukan biaya pemasangan peralatan kedalam harga perolehaan tersebut :

Unit/ AC Standing polytron Rp. 700.000,-

Kas Rp. 700.000,-

Setelaah biaya pemasangan peralatan dimasukan kedalam harga perolehaan maka harga perolehan asset tetap tersebut menjadi Rp. 21.540.000,-

Jurnal koreksi jika kesalahan ditemu kan kedalam buku yang bersangkutan 2017 yaitu :

Unit/ AC Standing polytron Rp. 700.000,-

Biaya Pemasangan Rp. 700.000,-

Setelah biaya pemasangan dimasukan kedalam harga perolehaan asset tetap yang disajikan kdalam neraaca akan bertambah besar dan harga perolehan menjadi lebih besar.

Bertambahnya harga perolehaan asset tetap akan berpengaruh pada perhitungan. Perhitungan ulang penyusutan asset tetap ter sebut untuk tahun 2012 yaitu :

$Rp. 21.540.000 \times 10\% \times 5/12$ (lima bulan pakai) = Rp. 897.500,-

Jurnal yang harusdibuat dinas yaitu :

Beban penyusutan peralatanRp. 897.500,-

Akumulasi penyusutan

Jurnal yang harus pembetulan dinas yaitu :

$Rp. 21.540.000 \times 10\% \times 5/12$ (beban setelah koreksi) = Rp. 897.500,-

$Rp. 20.840.000 \times 10\% \times 5/12$ (beban sebelum koreksi) = Rp.868.333,-

Jurnal pembetulan kesalahan yang dibuat dinas untuk tahun berjalan :

Akumulasi penyusutan peralatan Rp. 29.167,-

Beban penyusutanperalatan Rp. 29.167,-

Jika kesalahan ini dikoreksi setelah tutup buku maka journal pembetulan yang harus dibuat dinas yaitu :

Akumulasi penyusutan peralatan Rp. 29.167,-

Perolehan ditahan Rp. 29.167,-

Apabiladinas tidak memasukan semua biaya yang dikeluarkan kedalam biaya perolehan yang siap untuk digunakan, maka jumlah aset tetap yang diperoleh dinas dalam laporan keuangan lebih kecil (*under value*)dari yang seharusnya. Hal ini mengakibatkan besarnya nilai akumulasi penyusutan yang diperoleh dalam neraca lebih kecil atau bukan nilai yang seharusnya untuk setiap aset tetap.

b. Penentuan masa manfaat

Masa Manfaatadalah periode suatu aset diharapkan digunakan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak terdapat permasalahan sebagai berikut Aset yang sudah habis masa periodenya tetapi masih digunakan dalam operasi kegiatan dinas dan dinas masih melakukan pengeluaran biaya pemeliharaan atas asettetap tersebut. Salah satu nya, kendaraan Toyota (BM 233 S) sebesar Rp. 80.000.000,- diperoleh pada tanggal 15 mei 2007, disusutselama 7 tahun. Dan pada tahun 2013 sudah habisma masa manfaat aset

tersebut bernilai buku 0. Akan tetapi pada tahun 2014 dinas masih dilakukan pengeluaran biaya pemeliharaan kendaraan tersebut. Tanpa menambah masa aset tersebut, total biaya pemeliharaan dan perbaikan mobil tersebut pada tahun 2014 adalah 5.000.000,-. (Lampiran 3 DPA-SKPD 2014).

Pencatatan yang dilakukan dinas sebagai berikut :

Toyota (BM 233 S) Rp. 80.000.000,-

Kaas Rp. 80.000.000,-

Dinas dalam melakukan penyusutan Toyota (BM 233 S) diperoleh pada tahun 2007 disusutkan selama 7 tahun dari masa pemakaian awal tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 sehingga Perhitungan ulang penyusutan aset tetap setiap pertahunnya yaitu :

Beban penyusutan Toyota (BM 233 S) = $\frac{\text{Rp. 80.000.000,-}}{7 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 11.428.571,-}$ per tahun

Jurnal yang harus pembetulan dinas yaitu :

Beban penyusutan Rp. 11.428.571,-

Akumulasi penyusutan Rp. 11.428.571,-

Maka penyusutaannya yaitu :

Tahun 2007 = Akumulasi Penyusutan = $(2007-2007+1 \times \text{Rp. 11.428.571}) = \text{Rp. 11.428.571,-}$

Jurnal yang harus pembetulan dinas yaitu :

Beban penyusutan Rp. 11.428.571,-

Akumulasi penyusutan Rp. 11.428.571,-

Jumlah Kas tahun 2007 = $\text{Rp. 80.000.000} - \text{Rp. 11.428.571} = \text{Rp. 68.571.429,-}$

Jurnal yang harus dibuat pembetulan dinas yaitu : Akumulasi Penyusutan Rp. 68.571.429,-

Kas Rp. 68.571.429,-

Tahun 2008 = Akumulasi Penyusutan = $(2008-2007+2 \times \text{Rp. 11.428.571}) = \text{Rp. 22.857.144,-}$

Jurnal yang harus dibuat pembetulan dinas yaitu :

Beban penyusutan Rp. 22.857.144,-

Akumulasi penyusutan Rp. 22.857.144,-

Jumlah Kastahun 2008 = $\text{Rp. 80.000.000} - \text{Rp. 22.857.144} = \text{Rp. 57.142.856,-}$

Jurnal yang harus dibuat pembetulan dinas yaitu : Akumulasi Penyusutan Rp. 57.142.856,-

Kas Rp. 57.142.856,-

Tahun 2009 = Akumulasi Penyusutan = $(2009-2007+3 \times \text{Rp. 11.428.571}) = \text{Rp. 34.285.716,-}$

Jurnal yang harus dibuat pembetulan dinas yaitu :

Beban penyusutan Rp. 34.285.716,-

Akumulasi penyusutan Rp. 34.285.716,-

Jumlah Kas tahun 2009 = $\text{Rp. 80.000.000} - \text{Rp. 34.285.716} = \text{Rp. 45.714.284,-}$

Jurnal yang harus dibuat dinas adalah :

Akumulasi Penyusutan Rp. 45.714.284,-

Kas Rp. 45.714.284,-

Tahun 2010 = Akumulasi Penyusutan = $(2010-2007+4 \times \text{Rp. 11.428.571}) = \text{Rp. 45.714.288,-}$

Jurnal yang harus dibuat dinas yaitu :

Beban penyusutan Rp. 45.714.288,-

Akumulasi penyusutan Rp. 45.714.288,-

Jumlah Kas tahun 2010 = $\text{Rp. 80.000.000} - \text{Rp. 45.714.284} = \text{Rp. 34.285.712,-}$

Jurnal yang harus dibuat dinas yaitu : Akumulasi Penyusutan Rp. 34.285.712,-

Kas Rp. 34.285.712,-

Tahun 2011 = Akumulasi Penyusutan = $(2011-2007+5 \times \text{Rp. 11.428.571}) = \text{Rp. 57.142.861,-}$

Jurnal yang harus dibuat dinas yaitu :

Beban penyusutan Rp. 57.142.861,-

Akumulasi penyusutan Rp. 57.142.861,-

Jumlah Kastahun 2011 = $\text{Rp. 80.000.000} - \text{Rp. 57.142.861,-} = \text{Rp. 22.857.140,-}$

Jurnal yang harus dibuat dinas adalah : Akumulasi Penyusutan Rp. 22.857.140,-

Kas Rp. 22.857.140,-

Tahun 2012 = Akumulasi Penyusutan = $(2012-2007+6 \times \text{Rp. 11.428.571}) = \text{Rp. 68.571.433,-}$

Jurnal yang harus dibuat dinas adalah :

Beban penyusutan Rp. 68.571.433,-

Akumulasi penyusutan Rp.
68.571.433,-
Jumlah Kas tahun 2012 = Rp. 80.000.000
– Rp. 68.571.433,- = Rp. 11.428.567,-
Jurnal yang harus dibuat dinas adalah
Akumulasi Penyusutan Rp.
11.428.567,-
Kas Rp. 11.428.567,-
Tahun 2013 = Akumulasi Penyusutan =
(2013-2007+7 x Rp. 11.428.571) =Rp.
80.000.000,-
Jurnal yang harus dibuat dinas adalah
:Beban penyusutan
Rp. 80.000.000,-
Akumulasi penyusutan Rp.
80.000.000,-
Jumlah Kas tahun 2013 = Rp. 80.000.000
– Rp. 80.000.000,- = Rp. 0,-
Jurnal yang harus dibuat dinas adalah
:Akumulasi Penyusutan Rp. 0,-
Kas Rp. 0,-
Dinas dalam melakukan penyusutan
setahun penuh, menyebabkan nilai buku
aset di neraca untuk tahun berikutnya
dibukukan menjadi rendah per tahunnya.
Pada tahun 2014 dinas masih memelihara
dan memperbaiki mobil tersebut dengan
biaya service Rp. 5.000.000,- dan tidak
memasukkan ke biaya pemasangan
peralatan kedalam harga perolehan
tersebut :
Jurnal yang harus dibuat adalah :
Toyota (BM 233 S) Rp. 5.000.000,-
Kas Rp. 5.000.000,-

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah bentuk pengalokasian harga perolehan aktiva tetap sebagai beban periode akuntansi dalam masa manfaat aktiva tetap tersebut penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak terdapat permasalahan sebagai berikut Dinas memiliki mobil yang diperoleh bulan oktober 2013 sebesar Rp.

206.590.000,- baru dalam pemakaian, namun penyusutan pada tahun perolehannya dihitung satu tahun penuh. Dampak yang terjadi, pembebanan penyusutan pada periode tersebut terlalu tinggi, akibatnya biaya perolehan yang dihasilkan pada periode tersebut menjadi terlalu rendah, hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 “penyusutan dihitung 1 (satu) tahun meskipun baru di peroleh 1 (satu), atau 2 (dua) bulan atau bahkan 2 (hari), diadakan pada april 2015 maka penyusutannya dihitung pada tahun 2015”. Dalam peraturan standar akuntansi pemerintah PSAP No.71 tahun 2010 “ penyusutan aset dimulai pada saat aset tetap tersebut siap dipergunakan yaitu aset berada dilokasi dan kondisi yang siap gunakan sesuai dengan instansi pemerintahan, kecuali untuk aset yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya Pengerjaan aset tersebut”. Harga perolehan mobil sebesar Rp. 206.590.000,- taksiran ekonomis aset tersebut adalah 7 tahun. Besarnya penyusutan aset tetap yang diperhitungkan perusahaan yaitu sebagai berikut :

Beban penyusutan mobil =

Rp. 206.590.000,-

7 Tahun = Rp. 29.512.857,- per tahun

Sedangkan penyusutan 5 bulan = $\frac{5}{7} \times 29.512.857 =$ Rp. 7.378.214,-

Beban penyusutan mobil untuk tahun 2013 yang seharusnya dibebankan yaitu sebesar Rp. 7.378.214,- tetapi pada dinas, beban penyusutan untuk tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 29.512.857,-

Jurnal yang dibuat dinas untuk penyusutan mobil yaitu :

Beban penyusutan mobil Rp. 29.512.857

Akumulasi Penyusutan mobil Rp. Rp. 29.512.857,-

Jurnal yang seharusnya untuk penyusutan mobil pick up yaitu sebagai berikut :

Beban penyusutan mobil Rp. 7.378.214,-

Akumulasi Penyusutan mobil Rp. 7.378.214,-

Dinas dalam melakukan penyusutan 1 tahun penuh, menyebabkan nilai buku aset di neraca untuk tahun berikutnya dibukukan menjadi rendah sebagai akibat dari perhitungan akumulasi penyusutan yang terlalu tinggi. Perbebanan biaya penyusutan yang terlalu tinggi mengakibatkan perolehan dinas pada tahun 2013 dilaporkan kurang sejumlah Rp. 22.134.643,- yang diperoleh dari (Rp. 29.512.857 - Rp. 7.378.214).

Maka seharusnya jurnal pembetulan yang dibuat oleh dinas yaitu :

Akumulasi Penyusutan mobil Rp.
22.134.643,-

Beban penyusutan mobil Rp.
22.134.643,-

Perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh dinas sangat bertentangan dengan PSAP No.71 tahun 2010. Akibatnya dalam laporan perolehan yang dilaporkan dinas pada periode tersebut menjadi lebih rendah. Hal ini terjadi karena perbebanan penyusutan terlalu tinggi, sedangkan aset tetap yang dibukukan terlalu rendah. Ketidaktepatan ini disebabkan karena akumulasi penyusutan terlalu tinggi yang menyebabkan nilai pada aset tetap menjadi rendah dan juga mengurangi perolehan pada periode akumulasi yang bersangkutan, serta nilai buku neraca menjadi rendah.

Perhitungan ulang penyusutan aset tetap tersebut untuk 3 bulan adalah :

$Rp. 206.590.000 \times 10\% \times 3/12$ (tiga bulan pakai) = Rp. 5.164.750,-

Jurnal yang harus dibuat dinas adalah :

Beban penyusutan peralatan Rp.
5.164.750,-

Akumulasi penyusutan peralatan Rp. Rp.
5.164.750,-

Perhitungan ulang penyusutan aset tetap tersebut untuk 12 bulan adalah :

$Rp. 206.590.000 \times 10\% \times 12/12$ (tiga bulan pakai) = Rp. 20.659.000,-

Jurnal yang harus dibuat dinas adalah :

Beban penyusutan peralatan Rp.
20.659.000,-

Akumulasi penyusutan peralatan Rp.
20.659.000,-

Penyesuaian penyusutan aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau jasa service potensial yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap. Sehingga masa manfaat yang terlalu cepat bulannya yaitu 3 bulan pemakaian akan mempengaruhi nilai manfaat mobil tersebut.

d. Penghentian dan penghapusan aset tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang, aset yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, aset tetap gedung jika ada pelepasan dicatat berdasarkan nilai buku dan ditambah penyusutan (jika diketahui nilai penyusutannya). Nilai pelepasan aset tetap menggunakan sistem lelang, nilai pelepasan dicatat sebesar nilai wajar, tukar guling (*ruislag*) aset dicatat sebesar nilai wajar, masa waktu dapat dilakukan pelepasan aset tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak terdapat permasalahan sebagai berikut Penghentian dan penghapusan aset tetap. didalam daftar laporan keuangan aset tetap terdapat beberapa masalah yang ditemukan pada Dinas yaitu pada tahun 2002-2016,

sebesar Rp. 11.105.681.570,- terdapat aset dalam kondisi B (baik), yang masa manfaatnya sudah habis 0 (nol) namun masih dicantumkan kedalam daftar aset tetap tanpa dinilai kembali. tahun 2001-2012, sebesar Rp. 787.866.200,- tercatat aset dalam kondisi KB (kurang baik) atau rusak, yang masa manfaatnya sudah habis 0 (nol) dan terdapat satu aset Supra X (BM 3905 S) tahun 2012 sebesar Rp. 15.578.800,- masih ada tersisa masa umur 1 tahun dalam keadaan rusak namun masih tersajikan dalam laporan daftar aset tetap. kemudian Tahun 2001-2012 tercatat sebesar Rp. 2.231.415.400,- aset mengalami RB (rusak berat) yang masa manfaatnya sudah habis 0 (nol) dihentikan pemakaiannya akan tetapi tidak dilakukan pelepasan dan penghapusan di dalam neraca laporan keuangan aset tetap, sehingga hal tersebut tercatat sebagai kerugian. Menurut Peraturan PSAP No 71 Tahun 2010 dinyatakan sebagai suatu aset tetap yang dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. (Lampiran 5 Daftar Aset Tetap).

Pada permasalahan diatas terdapat berbagai permasalahan aset dimana aset yang sudah rusak dan kurang baik kondisinya seharusnya dieliminasi dan dilepaskan secara permanen dan tidak dipergunakan dan dimasukkan ke jurnal pelaporan aset tetap. Tetapi pada dinas Tahun 2001-2012 tercatat sebesar Rp. 2.231.415.400,- aset mengalami RB (rusak berat) yang masa manfaatnya sudah habis 0 (nol) dihentikan pemakaiannya akan tetapi tidak dilakukan pelepasan dan penghapusan di dalam neraca laporan keuangan aset tetap, sehingga hal tersebut tercatat sebagai kerugian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak merupakan salah satu Kantor Dinas yang terletak di Siak Sri Indrapura dengan berada di bawah naungan Pemerintahan Kabupaten Siak.

Dalam melaksanakan aktivitas – aktivitas yang dilakukan Dinas tersebut yang diperlukan sebagai suatu sistem pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang sesuai memenuhi unsur-unsur pelaksanaan yang benar. Sehubungan dengan itu maka Penulis telah menguraikan pada bab-bab sebelumnya. Maka berikut ini penulis dapat mencoba menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

a. Kesimpulan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam melakukan perolehan aset dilakukan dengan pembelian tunai, pembelian dengan harga perolehan yang dicatat dengan harga faktur dan tidak menambahkan biaya-biaya pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan langsung sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan standar akuntansi pemerintah PSAP No. 71 Tahun 2015.
2. Pada penetapan masa manfaat aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mendapati masih melakukan pencatatan pemeliharaan pada aset dalam melakukan kegiatan dinas yang mana aset tersebut sudah habis masa manfaatnya akan tetapi masih dilakukan pengeluaran biaya-biaya sehingga menambah harga perolehan aset tersebut.
3. Dalam perhitungan penyusutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak terdapat perhitungan aset tetap yang tidak sesuai yaitu perhitungan aset yang dilakukan satu tahun penuh pada aset yang mana aset tersebut sudah 3 bulan pemakaian hal ini akibatnya biaya perolehan yang dihasilkan pada periode tersebut menjadi terlalu rendah.

4. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pencatatan laporan keuangan aset tetap masih terdapat aset-aset yang masa manfaatnya sudah berakhir dan tidak mempunyai nilai ekonomi karena aset mengalami rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Akan tetapi dinas tidak melakukan penghentian dan penghapusan aset tersebut sehingga hal tersebut tercatat sebagai kerugian.

b. Saran - Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan bagi pihak Dinas dalam perbaikan pada masa yang akan datang. Saran-saran tersebut adalah :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak sebaiknya lebih terpadu pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dalam menentukan harga perolehan agar aset dapat memasukkan semua biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung sehingga dapat siap dipergunakan.
2. Dinas sebaiknya dalam penentuan masa manfaat aset lebih mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) karena biaya pemeliharaan masa aset yang dikeluarkan dan kondisi aset yang sudah habis masa manfaatnya, akan mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan kurang wajar dalam penyajian laporan keuangan yang sebenarnya.
3. Dalam melakukan perhitungan penyusutan sebaiknya dinas menghitung berdasarkan tanggal atau bulan pada saat perolehan aset tersebut. Sehingga pada melakukan pencatatan beban penyusutan dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap dapat disajikan dalam laporan keuangan sehingga menunjukkan nilai

wajar saat periode berjalan. Dengan menyesuaikan pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Dalam laporan keuangan aset tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak banyak terdapat aset yang tidak memiliki nilai ekonomis karena rusak atau tidak dapat digunakan lagi, seharusnya dinas melakukan penghapusan dan penghentian aset sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang menjelaskan tentang penghentian aset tetap tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Nordiawan, Deddi, DKK. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Fokusmedia. 2011. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : Fokusmedia
- Umar, Asri. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Koperasi Primer Prajamukti I Depdagri
- Dwi dan Mahfud. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Halim Dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik* : Salemba Empat
- Erlina, DKK. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*: Salemba Empat
- Muljono, Djoko. 2012. *Pengaruh Perpajakan Pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : Andi
- Hafiz Tanjung, Abdul. 2018. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*. Bandung : ALFABETA
- Peraturan Dikrektorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang

***Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis AkruaI Pada
Pemerintah Daerah Dan Modul
Penerapan Akuntansi : Jakarta
Pusat***

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 Tentang ***Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis AkruaI.***

Munawir, S 2010. ***Analisis Laporan
Keuangan Edisi Keempat.*** Cetak
Kelima Belas. Yogyakarta :Liberty

Mahmudi, 2010. ***Manajemen Keuangan
Daerah.*** Jakarta: Penerbit Erlangga

Evita Daufy Marcellya Makagansa, Jullie
J. Sondakh, Heince Wokas, 2015.
***Evaluasi Sistem Dan Prosedur
Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas
Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Sangihe,***
jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Volume 15 No.
05 Tahun 2015.

M.S Kolinug, Ventje Ilat Dan Sherly
Pinatik ,2015. ***Analisis Pengelolaan
Aset Tetap Pada DPPKAD Kota
Tomohon,*** Jurusan Akuntansi ,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol.3
No.1 Maret 2015. Hal. 818-830

Fresly Kornelius Engka, Jantje J.
Tinangon, dan Heince R. N.
Wokas ,2017. ***Analisis
Penerapan Psap No. 07 Tentang
Akuntansi Aset Tetap Pada
Kantor Badan Diklat
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara,*** Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Riset Akuntansi Going
Concern 12(2), 2017, 18-24.